



# **RENSTRA**

## **RENCANA STRATEGIS**

### **KEC. ASTANAANYAR**

#### **2018 - 2023**

**TELEPON:**  
**(022)-5200419**

**ALAMAT:**  
**JL. BOJONGLOA NO.69 BANDUNG**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu fungsi dari Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Astanaanyar pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Astanaanyar, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Bandung. Renstra Kecamatan



Astanaanyar memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2018-2023.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023;



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Astanaanyar adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Astanaanyar, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Astanaanyar, dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Astanaanyar dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Astanaanyar 2018-2023 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah**

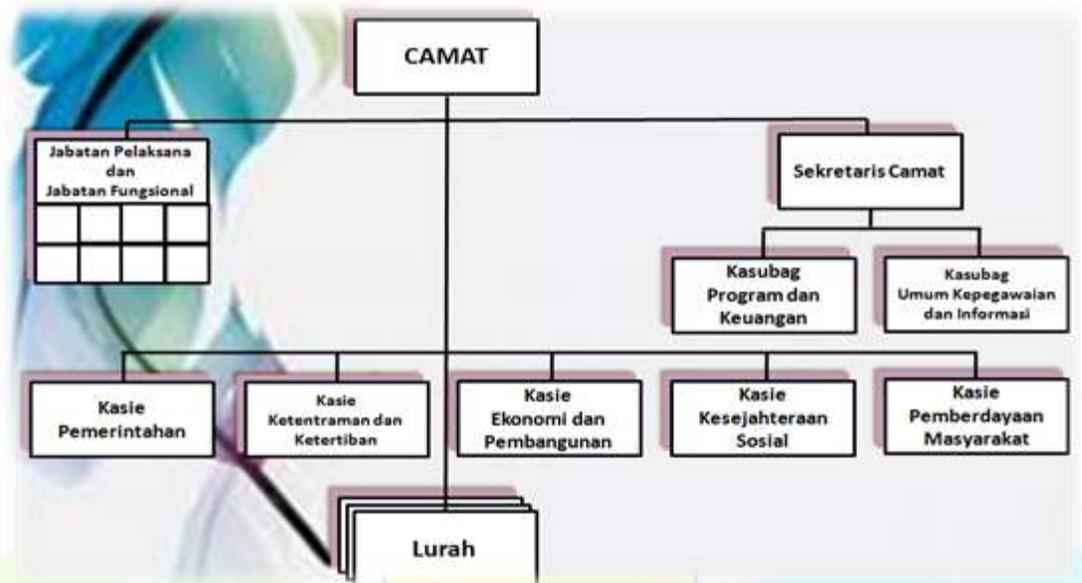
Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahann, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota bandung, susunan organisaasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Astanaanyar**



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

**Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;



10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **Sekretaris Kecamatan**

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
  - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
  - e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;



- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;



- v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup



- administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
  - g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
  - i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
  - j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
  - k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
  - l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  - n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
  - o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
  - p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
  - q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
  - s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
  - t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
  - u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik



- daerah lingkup Kecamatan;
- v. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
  - w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
  - x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  - y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
  - z. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
  - aa. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk public;
  - bb. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
  - cc. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
  - dd. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
  - ee. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
  - ff. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
  - gg. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
  - hh. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
  - ii. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - jj. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
  - kk. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - ll. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Keuangan dan Program**

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
  - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan- laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
  - g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;



- k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
- q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
- u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;



- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
- o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
  - f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - g. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
  - h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
  - i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - j. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
  - k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
  - k. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - l. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
  - m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;

- n. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
  - f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
  - g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
  - h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
  - j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
  - k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
  - l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;

- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
  - h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;



- i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;



- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
- k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Kecamatan Astanaanyar terletak pada posisi 107° 36' Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 675 di atas permukaan laut dan permukaan tanah relatif datar.

Kecamatan Astanaanyar merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Astanaanyar oleh Walikota

Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Andir
• Selatan	Kecamatan Bojongloa Kidul dan Bandung Kidul
• Barat	Kecamatan Bojongloa Kaler
• Timur	Kecamatan Regol

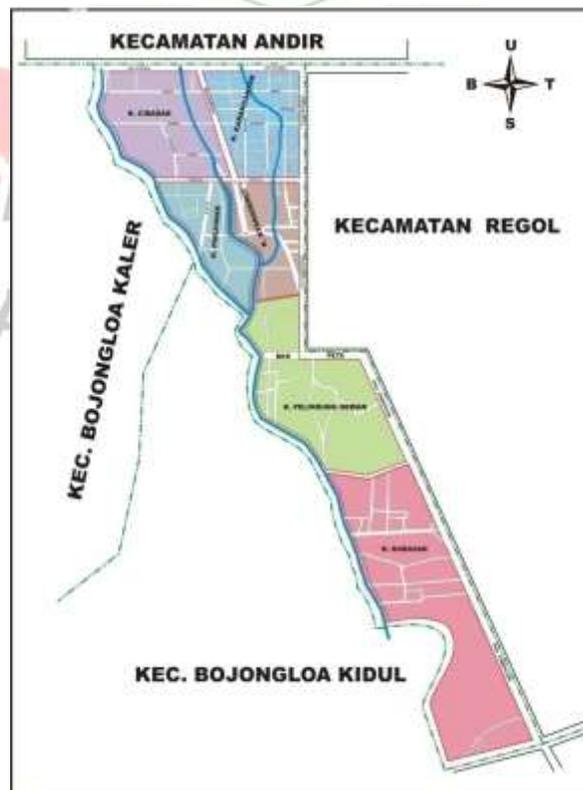
**Pembagian Wilayah Kecamatan Astanaanyar**

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Cibadak	9	76
2.	Karanganyar	9	45
3.	Nyengseret	7	47
4.	Panjunan	6	32
5.	Pelindung Hewan	10	59
6.	Karasak	6	45
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>304</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar Tahun 2021

Gambar 2.2

**Peta Kecamatan Astanaanyar**





Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 53 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 16 orang (30,19%) merupakan pegawai di Kecamatan, di Kelurahan sebanyak 37 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IV sebanyak 34 orang yaitu Para Kasi pada Kecamatan, para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana pada Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 17 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Astanaanyar, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Astanaanyar			2	7	7	16
2	Kelurahan Cibadak				4	3	7
3	Kelurahan Karanganyar				4	2	6
4	Kelurahan Nyengseret				5	1	6
5	Kelurahan Panjunan				5	1	6
6.	Kelurahan Pelindung Hewan				5	2	7
7.	Kelurahan Karasak				4	1	5
	<b>JUMLAH</b>			<b>2</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>53</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Astanaanyar, Bulan November Tahun 2021

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Astanaanyar		2	13	-	-	1		16
2	Kelurahan Cibadak		1	6	-	-			7
3	Kelurahan Karanganyar		1	4	-	1			6
4	Kelurahan Nyengseret		1	5	-	-			6
5	Kelurahan Panjunan		2	3	-	1			6
6.	Kelurahan Pelindung Hewan		1	3	-	2	1		7
7.	Kelurahan Karasak		0	4	-	1			5
	<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>53</b>
	<b>%</b>		15,10	71,70		9,43	3,77		100

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Astanaanyar, Bulan November Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 8 orang (15,10%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 38 orang (71,70%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 5 orang (9.43%), dan yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 2 orang (3,77%).

### **2.2.1. Sarana Dan Prasarana Kerja**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD**

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Astanaanyar dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti Potisasi, Kegiatan Pengadaan Bibit tanaman, Penebaran benih ikan di sungai-sungai di wilayah kecamatan Astanaanyar dan sebagainya.
4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Linmas, Pembentukan SATWANKAR di wilayah Kecamatan Astanaanyar dan sebagainya.



5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2009-2013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.3  
Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung  
Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	90	94	100	100	0	0,9	0,9	1	1
2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan				0	100	100	100	100	0	91	94	99,4	100	0	0,9	0,9	0,9	1
3	Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	0	100	100	100	0	0	90	100	100	0	0,9	0,9	1	1
4	Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat kecamatan dan kelurahan				0	100	100	100	100	0	93,1	97	90,1	100	0	0,9	0,9	0,9	1
5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	92	94	100	100	0	0,9	0,9	1	1
6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	89	100	98,1	100	0	0,8	1	0,9	1
7	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				0	100	100	100	100	0	99	100	97	100	0	0,9	1	0,9	1

KERAMAT  
KREATIF RESPONSIF  
AGAMIS  
AMANAH TERTIB

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Astanaanyar sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1470 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Astanaanyar untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Astanaanyar harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
8. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
9. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
10. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Astanaanyar dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Astanaanyar berada dalam Kawasan Perumahan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Tantangan**

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Astanaanyar;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Astanaanyar belum tertata dengan baik.
8. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Astanaanyar masih perlu ditingkatkan lagi;
9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

### **Peluang**

1. Penduduk Kecamatan Astanaanyar memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Astanaanyar yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Astanaanyar cukup signifikan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN ASTANAANYAR**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Astanaanyar, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Astanaanyar dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Astanaanyar sebagai berikut :

1. **Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah satunya dalam kaitan pelayanan KTP dan KK dengan prosedur tertentu menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama;**
2. **Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit;**
3. **Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Astanaanyar.**

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Astanaanyar dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Astanaanyar, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan tersebut adalah belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir segala bentuk partisipasi lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-faktor seperti belum terjalinnnya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi, misalnya kurangnya sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang menjadikan partisipasi lembaga kemasyarakatan belum optimal.
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antarlembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Astanaanyar, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kinerja aparatur, seperti kurangnya kendaraan dinas

bagi aparat, kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan, dll;

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Astanaanyar diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung antara lain :

1. Faktor internal yang sangat mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Astanaanyar adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM Kecamatan Astanaanyar memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).
2. Masih kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;
3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Astanaanyar;
3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Cibeuying Kaler, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cikak dan sungai citepus), kebakaran, dll.

4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja Pelayanan Kecamatan Astanaanyar, misalnya dalam lambatnya menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan Astanaanyar.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Astanaanyar dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

#### **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*
- Nyaman** : *Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk*

ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing  
*Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.*
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani  
*Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima*
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan  
*Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal*
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan  
*Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan*

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

*Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta*

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Astanaanyar tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Astanaanyar adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Astanaanyar.

### 3.3.2. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

**Gambar 3.1**  
**Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

### 3.3.3. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

#### **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

**Jabar Juara Lahir Batin** : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

**Inovasi** : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

**Kolaborasi** : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

**“Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID- 19.

Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

#### **A. Rencana Struktur Ruang**

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

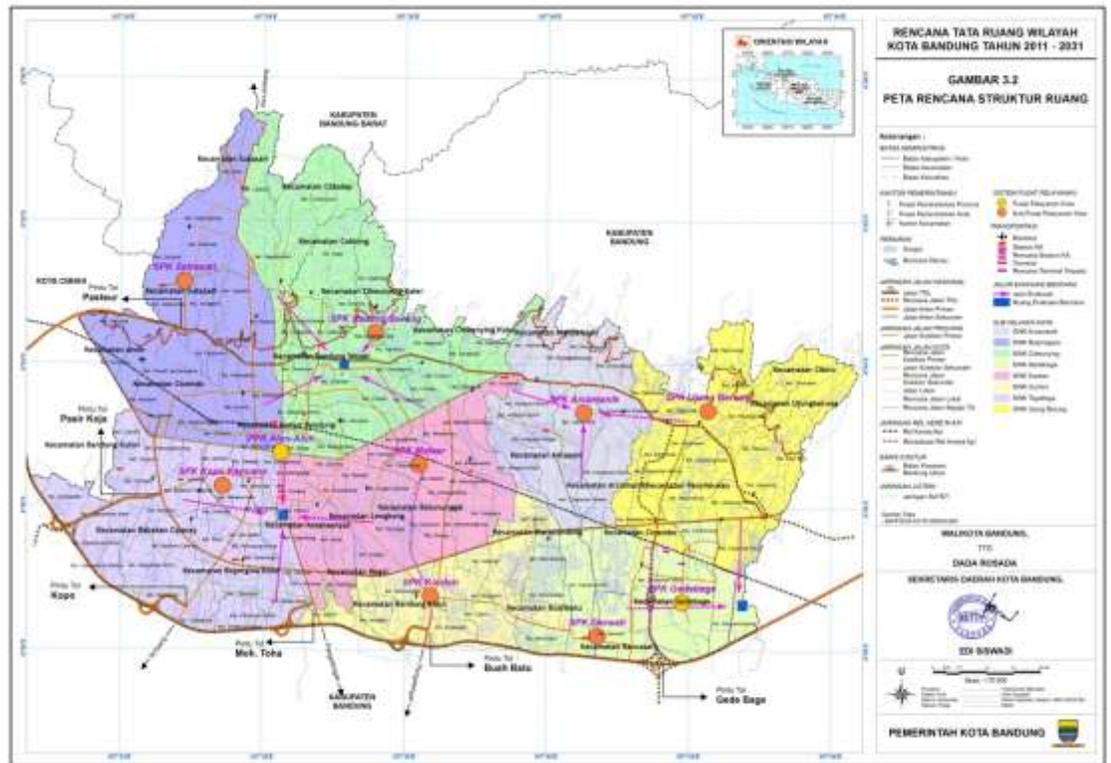
- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;



- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Astanaanyar;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Astanaanyar, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.2**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung**



## B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

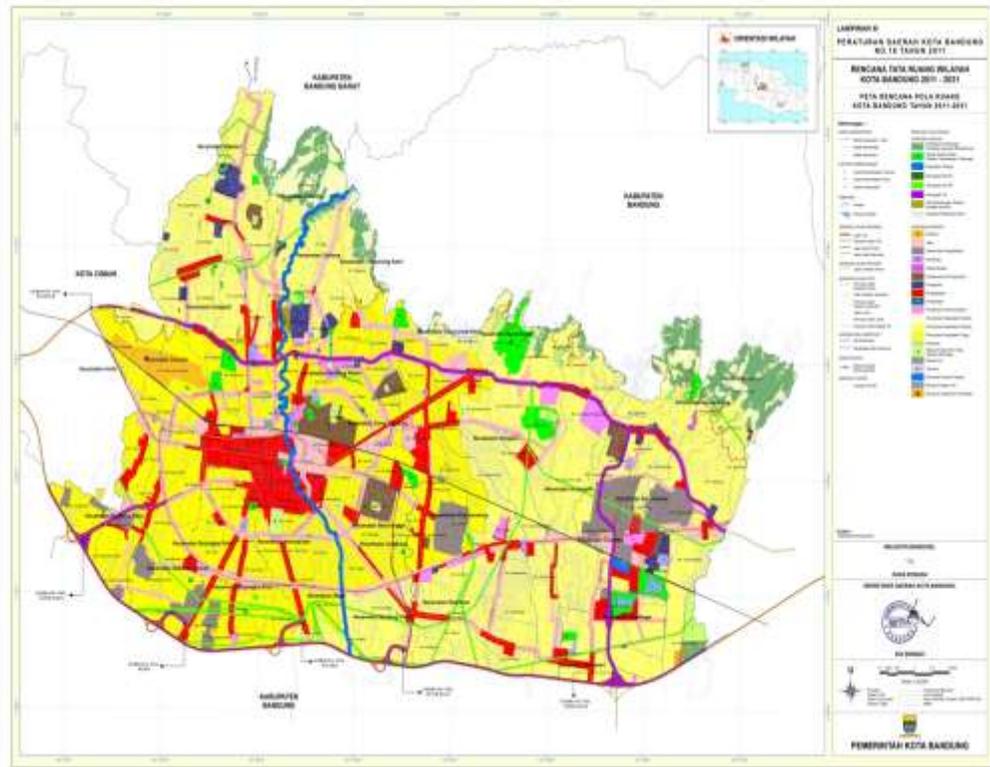
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

**Gambar 3.3**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung**



#### 3.4.2. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”** (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu

“Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan.

### **3.4.3. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023**

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu :

***“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”***

dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

### **3.5. Penentuan Isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- d. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
- e. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH
  - a. Isu Infrastruktur
6. Kemacetan lalu lintas
7. Ketersediaan transportasi umum
8. Buruknya drainase lingkungan
9. Kualitas jalan

- a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
- c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
- d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
- e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
- f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
- g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Astanaanyar dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<b>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)</b> Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.	<p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p> <p><b>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</b></p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Astanaanyar dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p>
----	--

3.		<p><b>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</b> Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>
4.		<p><b>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</b> Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p>



	<p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
--	---

KECAMATAN  
KREATIF RESPONSIF  
AGAMIS  
AMANAH TERTIB

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ASTANAANYAR**

#### **4.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Astanaanyar**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Astanaanyar menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasn hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Astanaanyar Sebelum Perubahan**  
**Tahun 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar	82	82,25	82,5	82,75	83
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Astanaanyar	82	82,25	82,5	82,75	83
			Persentase temua BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50	50	66	83	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah	75%	76%	77%	78%	79%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	75%	76%	77%	78%	79%



Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan



upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.

6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.



Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Astanaanyar juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
  - a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan
  - b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Astanaanyar
2. Pada misi 2, tujuan kecamatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar
  - b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan Renstra Kecamatan Astanaanyar Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setelah Perubahan Kecamatan Astanaanyar**  
**Tahun 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</b>											
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	92,75	54,00	59,00	71,00	75,00	78,00	78,00
		meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Astanaanyar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	92,75	54,00	59,00	71,00	75,00	78,00	78,00
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Astanaanyar	Persentase Siskamling RW aktif	%	n/a	n/a	n/a	51,00	63,00	76,00	76,00
<b>Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih</b>											
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar	Nilai	83,727	82,00	82,25	82,50	84,00	85,50	85,50



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode Renstra	Realisasi		Target Kinerja Setelah Perubahan			Kondisi Akhir Periode Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar	Persentase Kelurahan Unggul	%	n/a	50,00	50,00	66,70	83,33	100,00	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar	Nilai	83,727	82,00	82,25	82,50	84,00	85,50	85.50

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI  
**KERAMAT**  
**KREATIF RESPONSIF**  
**AGAMIS**  
**AMANAH TERTIB**



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

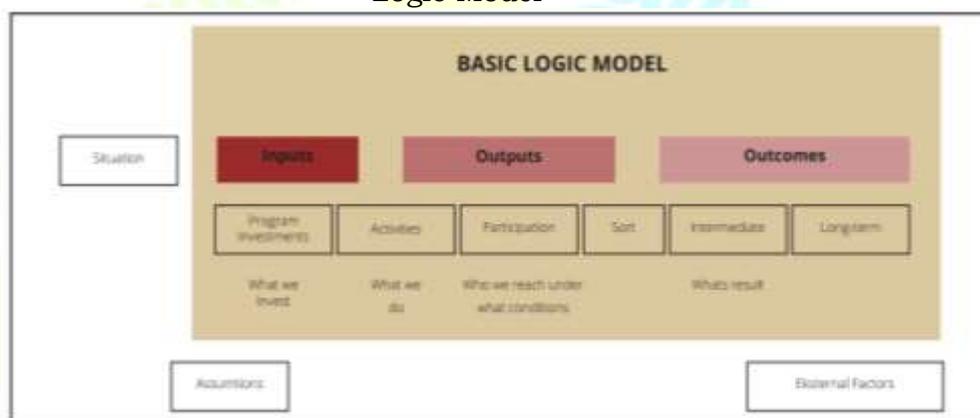
Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

*Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah

Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1  
Logic Model



### 5.1. Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut :



1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Astanaanyar
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Astanaanyar dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Sebelum Perubahan

<b>Visi</b>			
<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 2</b>			
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat

AMANAH TERTIB



Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Setelah Perubahan

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Astanaanyar	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Astanaanyar	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
<b>Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari



setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Astanaanyar pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reuiu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reuiu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta



anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Astanaanyar periode tahun 2018-2013 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung 2018-2023  
 Sebelum Perubahan**

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82		82,25		82,5		82,75		83		83			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82		82,25		82,5		82,75		83		83			
	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	2.146.941.638	100%	2.361.635.802	100%	2.597.799.382	100%	2.857.579.320	100%	3.143.337.252	100%	13.107.293.394		
	01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	65.820.050	12 Lap	72.402.055	12 Lap	79.642.261	12 Lap	87.606.487	12 Lap	96.367.135	12 Lap	401.837.987	Kec. Astanaanyar	Kecamatan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN ASTANAANYAR

Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	12.072.420	12 Lap	13.279.662	12 Lap	14.607.628	12 Lap	16.068.391	12 Lap	17.675.230	12 Lap	73.703.331	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	12.835.867	12 Lap	14.119.454	12 Lap	15.531.399	12 Lap	17.084.539	12 Lap	18.792.993	12 Lap	78.364.252	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et
01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	33.291.732	12 Lap	36.620.905	12 Lap	40.282.996	12 Lap	44.311.295	12 Lap	48.742.425	12 Lap	203.249.353	Kec. Astanaan yar	Kel. Karangan yar
01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	27.595.200	12 Lap	30.354.720	12 Lap	33.390.192	12 Lap	36.729.211	12 Lap	40.402.132	12 Lap	168.471.456	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan
01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	20.981.940	12 Lap	23.080.134	12 Lap	25.388.147	12 Lap	27.926.962	12 Lap	30.719.658	12 Lap	128.096.842	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak
01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	9.921.765	12 Lap	10.913.942	12 Lap	12.005.336	12 Lap	13.205.869	12 Lap	14.526.456	12 Lap	60.573.368	Kec. Astanaan yar	Kel. Pelindung Hewan
01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37 Unit	37 Unit	12.995.550	37 Unit	14.295.105	37 Unit	15.724.616	37 Unit	17.297.077	37 Unit	19.026.785	12 Lap	79.339.132	Kec. Astanaan yar	Kecamatan



01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	1.320.000	12 Lap	1.452.000	12 Lap	1.597.200	12 Lap	1.756.920	12 Lap	1.932.612	12 Lap	8.058.732	Kec. Astanaan yar	Kecamatan
01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	660.000	12 Lap	726.000	12 Lap	798.600	12 Lap	878.460	12 Lap	966.306	12 Lap	4.029.366	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	660.000	12 Lap	726.000	12 Lap	798.600	12 Lap	878.460	12 Lap	966.306	12 Lap	4.029.366	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et
01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	660.000	12 Lap	726.000	12 Lap	798.600	12 Lap	878.460	12 Lap	966.306	12 Lap	4.029.366	Kec. Astanaan yar	Kel. Karangan yar
01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	660.000	12 Lap	726.000	12 Lap	798.600	12 Lap	878.460	12 Lap	966.306	12 Lap	4.029.366	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan
01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	660.000	12 Lap	726.000	12 Lap	798.600	12 Lap	878.460	12 Lap	966.306	12 Lap	4.029.366	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak
01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Lap	12 Lap	660.000	12 Lap	726.000	12 Lap	798.600	12 Lap	878.460	12 Lap	966.306	12 Lap	4.029.366	Kec. Astanaan yar	Kel. Pelindung Hewan
01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	37.000.000	12 Lap	40.700.000	12 Lap	44.770.000	12 Lap	49.247.000	12 Lap	54.171.700	12 Lap	225.888.700	Kec. Astanaan yar	Kecamatan



01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	3.100.000	12 Lap	3.410.000	12 Lap	3.751.000	12 Lap	4.126.100	12 Lap	4.538.710	12 Lap	18.925.810	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.200.000	12 Lap	2.420.000	12 Lap	2.662.000	12 Lap	2.928.200	12 Lap	12.210.200	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et
01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.200.000	12 Lap	2.420.000	12 Lap	2.662.000	12 Lap	2.928.200	12 Lap	12.210.200	Kec. Astanaan yar	Kel. Karangan yar
01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.200.000	12 Lap	2.420.000	12 Lap	2.662.000	12 Lap	2.928.200	12 Lap	12.210.200	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan
01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.200.000	12 Lap	2.420.000	12 Lap	2.662.000	12 Lap	2.928.200	12 Lap	12.210.200	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak
01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.100.000	12 Lap	2.310.000	12 Lap	2.541.000	12 Lap	2.795.100	12 Lap	3.074.610	12 Lap	12.820.710	Kec. Astanaan yar	Kel. Pelindung Hewan
01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	130.173.753	12 Lap	143.191.128	12 Lap	157.510.241	12 Lap	173.261.265	12 Lap	190.587.392	12 Lap	794.723.779	Kec. Astanaan yar	Kecamatan
01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	10.332.305	12 Lap	11.365.536	12 Lap	12.502.089	12 Lap	13.752.298	12 Lap	15.127.528	12 Lap	63.079.755	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	7.384.567	12 Lap	8.123.024	12 Lap	8.935.326	12 Lap	9.828.859	12 Lap	10.811.745	12 Lap	45.083.520	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et



01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	7.999.151	12 Lap	8.799.066	12 Lap	9.678.973	12 Lap	10.646.870	12 Lap	11.711.557	12 Lap	48.835.617	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	9.184.185	12 Lap	10.102.604	12 Lap	11.112.864	12 Lap	12.224.150	12 Lap	13.446.565	12 Lap	56.070.368	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	7.821.500	12 Lap	8.603.650	12 Lap	9.464.015	12 Lap	10.410.417	12 Lap	11.451.458	12 Lap	47.751.040	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	7.595.802	12 Lap	8.355.382	12 Lap	9.190.920	12 Lap	10.110.012	12 Lap	11.121.014	12 Lap	46.373.131	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	176.287.750	12 Lap	193.916.525	12 Lap	213.308.178	12 Lap	234.638.995	12 Lap	258.102.895	12 Lap	1.076.254.343	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	4.306.400	12 Lap	4.737.040	12 Lap	5.210.744	12 Lap	5.731.818	12 Lap	6.305.000	12 Lap	26.291.003	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	5.000.000	12 Lap	5.500.000	12 Lap	6.050.000	12 Lap	6.655.000	12 Lap	7.320.500	12 Lap	30.525.500	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	9.297.168	12 Lap	10.226.885	12 Lap	11.249.573	12 Lap	12.374.531	12 Lap	13.611.984	12 Lap	56.760.140	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	5.880.000	12 Lap	6.468.000	12 Lap	7.114.800	12 Lap	7.826.280	12 Lap	8.608.908	12 Lap	35.897.988	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan



01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	5.119.200	12 Lap	5.631.120	12 Lap	6.194.232	12 Lap	6.813.655	12 Lap	7.495.021	12 Lap	31.253.228	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	6.312.500	12 Lap	6.943.750	12 Lap	7.638.125	12 Lap	8.401.938	12 Lap	9.242.131	12 Lap	38.538.444	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
01.012	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	22.230.519	12 Lap	24.453.571	12 Lap	26.898.928	12 Lap	29.588.821	12 Lap	32.547.703	12 Lap	135.719.542	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
01.012	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	6.187.800	12 Lap	6.806.580	12 Lap	7.487.238	12 Lap	8.235.962	12 Lap	9.059.558	12 Lap	37.777.138	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
01.012	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	1.662.300	12 Lap	1.828.530	12 Lap	2.011.383	12 Lap	2.212.521	12 Lap	2.433.773	12 Lap	10.148.508	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
01.012	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	988.813	12 Lap	1.087.694	12 Lap	1.196.464	12 Lap	1.316.110	12 Lap	1.447.721	12 Lap	6.036.802	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar



01.012	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	1.850.010	12 Lap	2.035.011	12 Lap	2.238.512	12 Lap	2.462.363	12 Lap	2.708.600	12 Lap	11.294.496	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan
01.012	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.029.770	12 Lap	2.232.747	12 Lap	2.456.022	12 Lap	2.701.624	12 Lap	2.971.786	12 Lap	12.391.949	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak
01.012	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.226.440	12 Lap	2.449.084	12 Lap	2.693.992	12 Lap	2.963.392	12 Lap	3.259.731	12 Lap	13.592.639	Kec. Astanaan yar	Kel. Pelindung Hewan
01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	79.856.834	12 Lap	87.842.517	12 Lap	96.626.769	12 Lap	106.289.446	12 Lap	116.918.391	12 Lap	487.533.957	Kec. Astanaan yar	Kecamatan
01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	217.769.533	12 Lap	239.546.486	12 Lap	263.501.135	12 Lap	289.851.248	12 Lap	318.836.373	12 Lap	1.329.504.776	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	26.023.484	12 Lap	28.625.832	12 Lap	31.488.416	12 Lap	34.637.257	12 Lap	38.100.983	12 Lap	158.875.972	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengseret
01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	968.000	12 Lap	1.064.800	12 Lap	1.171.280	12 Lap	1.288.408	12 Lap	1.417.249	12 Lap	5.909.737	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak



01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	8.195.000	12 Lap	9.014.500	12 Lap	9.915.950	12 Lap	10.907.545	12 Lap	11.998.300	12 Lap	50.031.295	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	22.965.700	12 Lap	25.262.270	12 Lap	27.788.497	12 Lap	30.567.347	12 Lap	33.624.081	12 Lap	140.207.895	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	4.554.200	12 Lap	5.009.620	12 Lap	5.510.582	12 Lap	6.061.640	12 Lap	6.667.804	12 Lap	27.803.846	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.200.000	12 Lap	2.420.000	12 Lap	2.662.000	12 Lap	2.928.200	12 Lap	12.210.200	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	2.000.000	12 Lap	2.200.000	12 Lap	2.420.000	12 Lap	2.662.000	12 Lap	2.928.200	12 Lap	12.210.200	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	1.750.500	12 Lap	1.925.550	12 Lap	2.118.105	12 Lap	2.329.916	12 Lap	2.562.907	12 Lap	10.686.978	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	1.418.000	12 Lap	1.559.800	12 Lap	1.715.780	12 Lap	1.887.358	12 Lap	2.076.094	12 Lap	8.657.032	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	24.345.930	12 Lap	26.780.523	12 Lap	29.458.575	12 Lap	32.404.433	12 Lap	35.644.876	12 Lap	148.634.337	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan



01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	21.936.000	12 Lap	24.129.600	12 Lap	26.542.560	12 Lap	29.196.816	12 Lap	32.116.498	12 Lap	133.921.474	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	636.000	12 Lap	699.600	12 Lap	769.560	12 Lap	846.516	12 Lap	931.168	12 Lap	3.882.844	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	2.230.000	12 Lap	2.453.000	12 Lap	2.698.300	12 Lap	2.968.130	12 Lap	3.264.943	12 Lap	13.614.373	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	3.036.000	12 Lap	3.339.600	12 Lap	3.673.560	12 Lap	4.040.916	12 Lap	4.445.008	12 Lap	18.535.084	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	2.616.000	12 Lap	2.877.600	12 Lap	3.165.360	12 Lap	3.481.896	12 Lap	3.830.086	12 Lap	15.970.942	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	1.000.000	12 Lap	1.100.000	12 Lap	1.210.000	12 Lap	1.331.000	12 Lap	1.464.100	12 Lap	6.105.100	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Lap	12 Lap	3.556.000	12 Lap	3.911.600	12 Lap	4.302.760	12 Lap	4.733.036	12 Lap	5.206.340	12 Lap	21.709.736	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan



01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	178.820.000	12 Lap	196.702.000	12 Lap	216.372.200	12 Lap	238.009.420	12 Lap	261.810.362	12 Lap	1.091.713.982	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	10.000.000	12 Lap	11.000.000	12 Lap	12.100.000	12 Lap	13.310.000	12 Lap	14.641.000	12 Lap	61.051.000	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	15.000.000	12 Lap	16.500.000	12 Lap	18.150.000	12 Lap	19.965.000	12 Lap	21.961.500	12 Lap	91.576.500	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	15.000.000	12 Lap	16.500.000	12 Lap	18.150.000	12 Lap	19.965.000	12 Lap	21.961.500	12 Lap	91.576.500	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	15.000.000	12 Lap	16.500.000	12 Lap	18.150.000	12 Lap	19.965.000	12 Lap	21.961.500	12 Lap	91.576.500	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	7.800.000	12 Lap	8.580.000	12 Lap	9.438.000	12 Lap	10.381.800	12 Lap	11.419.980	12 Lap	47.619.780	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Lap	12 Lap	15.600.000	12 Lap	17.160.000	12 Lap	18.876.000	12 Lap	20.763.600	12 Lap	22.839.960	12 Lap	95.239.560	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
01.018	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Lap	12 Lap	160.000.000	12 Lap	176.000.000	12 Lap	193.600.000	12 Lap	212.960.000	12 Lap	234.256.000	12 Lap	976.816.000	Kec. Astanaanyar	Kecamatan



01.019	Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 Lap	12 Lap	622.000.000	12 Lap	684.200.000	12 Lap	752.620.000	12 Lap	827.882.000	12 Lap	910.670.200	12 Lap	3.797.372.200	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	3.122.538.560	100%	3.922.792.416	100%	3.928.071.658	100%	4.488.378.823	100%	4.862.216.706	100%	20.323.998.163		
02.003	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah unit pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	n/a	n/a		1 unit	420.000.000	3 Unit	75.000.000	1 unit	250.000.000	7 unit	200.000.000	12 unit	945.000.000	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
02.012	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur.	Jumlah Unit perlengkapan dan peralatan aparatur	6 Unit	20 unit	431.618.560	20 unit	474.780.416	20 unit	522.258.458	20 unit	574.484.303	20 unit	631.932.734	20 unit	2.635.074.471	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
02.013	Pengadaan Dekorasi ruang kantor	Jumlah ruang yang didekorasi	2 ruang	n/a		2 ruang	68.000.000	2 ruang	74.800.000	2 ruang	82.280.000	2 ruang	90.508.000	2 ruang	315.588.000	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung/bangunan yang terpelihara	1 unit	4 unit	433.000.000	4 unit	476.300.000	4 unit	523.930.000	4 unit	576.323.000	4 unit	633.955.300	4 unit	2.643.508.300	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	42 unit	42 unit	676.920.000	42 unit	744.612.000	42 unit	819.073.200	42 unit	900.980.520	42 unit	991.078.572	42 unit	4.132.664.292	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	n/a	2 gedung	1.581.000.000	1 gedung	1.739.100.000	1 gedung	1.913.010.000	1 gedung	2.104.311.000	1 gedung	2.314.742.100	2 gedung	9.652.163.100	Kec. Astanaanyar	Kecamatan



	03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>	100%	100%	66.990.000	100%	177.378.000	100%	195.115.800	100%	214.627.380	100%	236.090.118	100%	890.201.298		
	03.002	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Jumlah stel pakaian dinas beserta pelengkapannya	116 Stel	116 Stel	66.990.000	120 Stel	73.689.000	120 Stel	81.057.900	120 Stel	89.163.690	120 Stel	98.080.059	120 Stel	408.980.649	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
	03.004	<i>Pengadaan Pakaian KORPRI</i>	Jumlah Stel Pakaian Korpri	n/a	n/a		55	30.000.000	55	33.000.000	55	36.300.000	55	39.930.000	55	139.230.000	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
	03.005	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	Jumlah Stel Pakaian khusus hari-hari tertentu	116 tel	n/a		120 Stel	73.689.000	120 Stel	81.057.900	120 Stel	89.163.690	120 Stel	98.080.059	120 Stel	341.990.649	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
	05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	610.510.000		
	05.004	<i>Pembinaan Kinerja Aparatur</i>	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan	n/a	60 orag	100.000.000	60 orag	110.000.000	60 orag	121.000.000	60 orag	133.100.000	60 orag	146.410.000	60 orag	610.510.000	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
			<b>Presentase kelurahan unggul</b>	50%	50%		50%						100%		100%			
<b>Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan</b>			<b>Presentase kelurahan unggul</b>	50%	50%		50%		66%		83%		100%		100%			



n lingkungan																		
	25	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15%		23.371.400	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0		
	25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	60	17.504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
	25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	10	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Nyengseret
	25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	10	996.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Karangan
	25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	10	2.821.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Panjunan
	25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	10	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Cibadak
	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	36.983.233	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		
	19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	150 orang	150 orang	24.562.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kecamatan



		RKPD kewilayahan	musrenbang kecamatan																
	19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	30 orang	1.446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
	19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	30 orang	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
	19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	30 orang	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
	19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	30 orang	2.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
	19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	30 orang	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
	19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	30 orang	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan



		RKPD kewilayahan																
42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih			2.156.055. 389		2.371.660. 928		2.608.827. 021		2.869.709.7 23		3.156.680.6 95		13.162.933. 755		
42.015		Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	n/a	50 m2	139.281.00 0	50 m2	153.209.10 0	50 m2	168.530.01 0	50 m2	185.383.011	50 m2	203.921.312	50 m2	850.324.433	Kec. Astanaan yar	Kecamata n
42.015		Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	n/a	50 m2	1.016.773	50 m2	1.118.450	50 m2	1.230.295	50 m2	1.353.325	50 m2	1.488.657	50 m2	6.207.501	Kec. Astanaan yar	Nyengser et
42.015		Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	n/a	50 m2	937.086	50 m2	1.030.795	50 m2	1.133.874	50 m2	1.247.261	50 m2	1.371.988	50 m2	5.721.004	Kec. Astanaan yar	Cibadak
42.014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	n/a	300 m	156.417.63 0	300 m	172.059.39 3	300 m	189.265.33 2	300 m	208.191.866	300 m	229.011.052	300 m	954.945.273	Kec. Astanaan yar	Kecamata n
42.014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	n/a	300 m	309.841.50 0	300 m	340.825.65 0	300 m	374.908.21 5	300 m	412.399.037	300 m	453.638.940	300 m	1.891.613.3 42	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
42.014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	n/a	300 m	300.998.80 0	300 m	331.098.68 0	300 m	364.208.54 8	300 m	400.629.403	300 m	440.692.343	300 m	1.837.627.7 74	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et



42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	n/a	300 m	300.000.000	300 m	330.000.000	300 m	363.000.000	300 m	399.300.000	300 m	439.230.000	300 m	1.831.530.000	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	n/a	300 m	300.000.000	300 m	330.000.000	300 m	363.000.000	300 m	399.300.000	300 m	439.230.000	300 m	1.831.530.000	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	n/a	300 m	312.674.400	300 m	343.941.840	300 m	378.336.024	300 m	416.169.626	300 m	457.786.589	300 m	1.908.908.479	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	n/a	300 m	311.117.500	300 m	342.229.250	300 m	376.452.175	300 m	414.097.393	300 m	455.507.132	300 m	1.899.403.449	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	n/a	500 m	20.730.000	500 m	22.803.000	500 m	25.083.300	500 m	27.591.630	500 m	30.350.793	500 m	126.558.723	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	n/a	500 m	1.040.600	500 m	1.144.660	500 m	1.259.126	500 m	1.385.039	500 m	1.523.542	500 m	6.352.967	Kec. Astanaanyar	Karasak
42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	n/a	500 m	998.000	500 m	1.097.800	500 m	1.207.580	500 m	1.328.338	500 m	1.461.172	500 m	6.092.890	Kec. Astanaanyar	Nyengseret
42.016	Kegiatan pengecatan	Panjang kerb terpelihara	n/a	500 m	1.002.100	500 m	1.102.310	500 m	1.212.541	500 m	1.333.795	500 m	1.467.175	500 m	6.117.921	Kec. Astanaanyar	Cibadak



		Kerb bahu jalan															
	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana			1.542.898.830	-	0	-	-	-	-	-	-	0		
	15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	7	994.904.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaan yar	Kecamatan
	15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	1	94.593.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
	15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	1	91.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengseret
	15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaan yar	Kel. Karanganyar
	15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	1	90.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan
	15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak



15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	2	91.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik			1.534.685.639		1.688.154.203		1.856.969.623		2.042.666.586		2.246.933.244		9.369.409.295		
20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	n/a	12 lap	52.460.000	12 lap	57.706.000	12 lap	63.476.600	12 lap	69.824.260	12 lap	76.806.686	12 lap	320.273.546	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	n/a	12 lap	4.350.312	12 lap	4.785.343	12 lap	5.263.878	12 lap	5.790.265	12 lap	6.369.292	12 lap	26.559.090	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	n/a	12 lap	999.848	12 lap	1.099.833	12 lap	1.209.816	12 lap	1.330.798	12 lap	1.463.877	12 lap	6.104.172	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	n/a	12 lap	920.000	12 lap	1.012.000	12 lap	1.113.200	12 lap	1.224.520	12 lap	1.346.972	12 lap	5.616.692	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN ASTANAANYAR

Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

		dan Kependudukan kewilayahan																
20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	n/a	12 lap	2.821.000	12 lap	3.103.100	12 lap	3.413.410	12 lap	3.754.751	12 lap	4.130.226	12 lap	17.222.487	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan	
20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	n/a	12 lap	608.479	12 lap	669.327	12 lap	736.260	12 lap	809.886	12 lap	890.874	12 lap	3.714.825	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak	
20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	n/a	47	88.680.000	47	97.548.000	47	107.302.800	47	118.033.080	47	129.836.388	47	541.400.268	Kec. Astanaanyar	Kecamatan	
20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	n/a	47	199.750.000	47	219.725.000	47	241.697.500	47	265.867.250	47	292.453.975	47	1.219.493.725	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak	
20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	n/a	47	212.250.000	47	233.475.000	47	256.822.500	47	282.504.750	47	310.755.225	47	1.295.807.475	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret	
20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	n/a	47	217.000.000	47	238.700.000	47	262.570.000	47	288.827.000	47	317.709.700	47	1.324.806.700	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar	
20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	n/a	47	153.846.000	47	169.230.600	47	186.153.660	47	204.769.026	47	225.245.929	47	939.245.215	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan	



	20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	n/a	47	327.600.000	47	360.360.000	47	396.396.000	47	436.035.600	47	479.639.160	47	2.000.030.760	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
	20.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	n/a	47	273.400.000	47	300.740.000	47	330.814.000	47	363.895.400	47	400.284.940	47	1.669.134.340	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
	25	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>50%</b>		<b>276.330.000</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	0			
	25.001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	130.154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
	25.001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	cibadak
	25.001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	nyengseret
	25.001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	2.596.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Panjunan
	25.003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Cibadak



25.003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Karanganyar
25.003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Panjunan
25.003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	130.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
25.003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	12 Lap	5.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Karanganyar
33	<b>Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan</b>	<b>Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>			565.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
33.001	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lemaba yang mengikuti lomba tk kota	n/a	6	190.488.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
33.001	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lemaba yang mengikuti lomba tk kota	n/a	1	72.542.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
33.001	Kegiatan peningkatan SDM Kader	Jumlah kelompok/kader/lem	n/a	1	56.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret





		Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lem baga yang mengikuti lomba tk kota		-	-	1	79.796.200	1	87.775.820	1	96.553.402	1	106.208.742	1	370.334.164	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
		Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lem baga yang mengikuti lomba tk kota		-	-	1	61.600.000	1	67.760.000	1	74.536.000	1	81.989.600	1	285.885.600	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et
		Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lem baga yang mengikuti lomba tk kota		-	-	1	49.500.000	1	54.450.000	1	59.895.000	1	65.884.500	1	229.729.500	Kec. Astanaan yar	Kel. Karangan yar
		Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lem baga yang mengikuti lomba tk kota		-	-	1	41.580.000	1	45.738.000	1	50.311.800	1	55.342.980	1	192.972.780	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan
		Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lem baga yang mengikuti lomba tk kota		-	-	1	68.667.500	1	75.534.250	1	83.087.675	1	91.396.443	1	318.685.868	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak
		Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lem baga yang mengikuti lomba tk kota		-	-	1	111.100.000	1	122.210.000	1	134.431.000	1	147.874.100	1	515.615.100	Kec. Astanaan yar	Kel. Pelindung Hewan
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	-	-	9	1.094.394.488	9	1.203.833.937	12	1.324.217.330	10	1.456.639.064	40	5.079.084.819	Kec. Astanaan yar	Kecamatan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN ASTANAANYAR

Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	-	-	1	104.053.125	1	114.458.438	2	125.904.281	1	138.494.709	5	482.910.553	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	-	-	1	100.101.100	1	110.111.210	2	121.122.331	2	133.234.564	6	464.569.205	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	-	-	2	99.000.000	2	108.900.000	2	119.790.000	2	131.769.000	8	459.459.000	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganyar
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	-	-	1	99.825.000	1	109.807.500	2	120.788.250	1	132.867.075	5	463.287.825	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	-	-	2	99.000.000	2	108.900.000	2	119.790.000	2	131.769.000	8	459.459.000	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	n/a	-	-	2	100.815.000	2	110.896.500	2	121.986.150	2	134.184.765	8	467.882.415	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
		Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	143.169.400	12 Lap	157.486.340	12 Lap	173.234.974	12 Lap	190.558.471	12 Lap	664.449.185	Kec. Astanaanyar	Kecamatan
		Penguatan Kelembagaan Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	1.100.000	12 Lap	1.210.000	12 Lap	1.331.000	12 Lap	1.464.100	12 Lap	5.105.100	Kec. Astanaanyar	cibadak



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN ASTANAANYAR

Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

		<i>Penguatan Kelembagaan Masyarakat</i>	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	1.155.000	12 Lap	1.270.500	12 Lap	1.397.550	12 Lap	1.537.305	12 Lap	5.360.355	Kec. Astanaan yar	nyengser et
		<i>Penguatan Kelembagaan Masyarakat</i>	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	2.855.600	12 Lap	3.141.160	12 Lap	3.455.276	12 Lap	3.800.804	12 Lap	13.252.840	Kec. Astanaan yar	Panjunan
		<i>Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif</i>	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	1.100.000	12 Lap	1.210.000	12 Lap	1.331.000	12 Lap	1.464.100	12 Lap	5.105.100	Kec. Astanaan yar	Cibadak
		<i>Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif</i>	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	3.520.000	12 Lap	3.872.000	12 Lap	4.259.200	12 Lap	4.685.120	12 Lap	16.336.320	Kec. Astanaan yar	Karangan yar
		<i>Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif</i>	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	1.485.000	12 Lap	1.633.500	12 Lap	1.796.850	12 Lap	1.976.535	12 Lap	6.891.885	Kec. Astanaan yar	Panjunan
		<i>Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif</i>	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	143.077.000	12 Lap	157.384.700	12 Lap	173.123.170	12 Lap	190.435.487	12 Lap	664.020.357	Kec. Astanaan yar	Kecamatan
		<i>Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif</i>	jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	n/a	-	-	12 Lap	6.501.000	12 Lap	7.151.100	12 Lap	7.866.210	12 Lap	8.652.831	12 Lap	30.171.141	Kec. Astanaan yar	Karangan yar
		<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	-	-	60	19.254.400	60	21.179.840	60	23.297.824	60	25.627.606	60	89.359.670	Kec. Astanaan yar	Kecamatan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN ASTANAANYAR

Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	-	-	10	1.155.000	10	1.270.500	10	1.397.550	10	1.537.305	10	5.360.355	Kec. Astanaan yar	Nyengser et
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	-	-	10	1.096.040	10	1.205.644	10	1.326.208	10	1.458.829	10	5.086.722	Kec. Astanaan yar	Karangan yar
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	-	-	10	3.103.100	10	3.413.410	10	3.754.751	10	4.130.226	10	14.401.487	Kec. Astanaan yar	Panjunan
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kelurahan	n/a	-	-	10	1.100.000	10	1.210.000	10	1.331.000	10	1.464.100	10	5.105.100	Kec. Astanaan yar	Cibadak
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	150 orang	-	-	150 orang	27.018.456	150 orang	29.720.302	150 orang	32.692.332	150 orang	35.961.565	150 orang	125.392.656	Kec. Astanaan yar	Kecamatan
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	-	-	30 orang	1.590.600	30 orang	1.749.660	30 orang	1.924.626	30 orang	2.117.089	30 orang	7.381.975	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	-	-	30 orang	1.155.000	30 orang	1.270.500	30 orang	1.397.550	30 orang	1.537.305	30 orang	5.360.355	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et



		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	-	-	30 orang	5.720.000	30 orang	6.292.000	30 orang	6.921.200	30 orang	7.613.320	30 orang	26.546.520	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganayar
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	-	-	30 orang	2.997.500	30 orang	3.297.250	30 orang	3.626.975	30 orang	3.989.673	30 orang	13.911.398	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	-	-	30 orang	1.100.000	30 orang	1.210.000	30 orang	1.331.000	30 orang	1.464.100	30 orang	5.105.100	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	-	-	30 orang	1.100.000	30 orang	1.210.000	30 orang	1.331.000	30 orang	1.464.100	30 orang	5.105.100	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
			Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	n/a	75%		76%		77%		78%		79%		79%			
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	n/a	75%		76%		77%		78%		79%		79%			
26		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>6.500.870.310</b>	<b>76%</b>	<b>7.150.957.341</b>	<b>77%</b>	<b>7.866.053.075</b>	<b>78%</b>	<b>8.652.658.383</b>	<b>79%</b>	<b>9.517.924.221</b>	<b>79%</b>	<b>46.448.370.310</b>		



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN ASTANAANYAR

Jl. Bojongloa No. 69 Bandung Tep. (022) 5200419

26.001	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	599.643.840	24 sub kegiatan	750.000.000	24 sub kegiatan	900.000.000	24 sub kegiatan	1.050.000.000	24 sub kegiatan	1.200.000.000	120 sub kegiatan	4.499.643.840	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
26.001	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	699.926.420	24 sub kegiatan	875.000.000	24 sub kegiatan	1.050.000.000	24 sub kegiatan	1.225.000.000	24 sub kegiatan	1.400.000.000	120 sub kegiatan	5.249.926.420	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret
26.001	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	899.978.180	24 sub kegiatan	1.125.000.000	24 sub kegiatan	1.350.000.000	24 sub kegiatan	1.575.000.000	24 sub kegiatan	1.800.000.000	120 sub kegiatan	6.749.978.180	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganayar
26.001	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	599.999.565	24 sub kegiatan	625.000.000	24 sub kegiatan	750.000.000	24 sub kegiatan	762.500.000	24 sub kegiatan	887.500.000	120 sub kegiatan	3.624.999.565	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan
26.001	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	899.998.065	24 sub kegiatan	875.000.000	24 sub kegiatan	1.050.000.000	24 sub kegiatan	1.225.000.000	24 sub kegiatan	1.347.500.000	120 sub kegiatan	5.397.498.065	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak
26.001	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW	24 sub kegiatan	24 sub kegiatan	1.000.786.055	24 sub kegiatan	1.250.000.000	24 sub kegiatan	1.500.000.000	24 sub kegiatan	1.750.000.000	24 sub kegiatan	1.925.000.000	120 sub kegiatan	7.425.786.055	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
26.002	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	99.706.507	5 sub kegiatan	125.000.000	5 sub kegiatan	150.000.000	5 sub kegiatan	175.000.000	5 sub kegiatan	200.000.000	25 sub kegiatan	749.706.507	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak
26.002	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	100.000.000	5 sub kegiatan	125.000.000	5 sub kegiatan	150.000.000	5 sub kegiatan	175.000.000	5 sub kegiatan	200.000.000	25 sub kegiatan	750.000.000	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret



26.002	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	99.969.600	5 sub kegiatan	125.000.000	5 sub kegiatan	150.000.000	5 sub kegiatan	175.000.000	5 sub kegiatan	200.000.000	25 sub kegiatan	749.969.600	Kec. Astanaan yar	Kel. Karangan yar
26.002	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	99.999.395	5 sub kegiatan	125.000.000	5 sub kegiatan	150.000.000	5 sub kegiatan	175.000.000	5 sub kegiatan	200.000.000	25 sub kegiatan	749.999.395	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan
26.002	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	99.999.279	5 sub kegiatan	125.000.000	5 sub kegiatan	150.000.000	5 sub kegiatan	175.000.000	5 sub kegiatan	200.000.000	25 sub kegiatan	749.999.279	Kec. Astanaan yar	Kel. Cibadak
26.002	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	100.156.903	5 sub kegiatan	125.000.000	5 sub kegiatan	150.000.000	5 sub kegiatan	175.000.000	5 sub kegiatan	200.000.000	25 sub kegiatan	750.156.903	Kec. Astanaan yar	Kel. Pelindung Hewan
26.003	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	100.000.092	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	750.000.092	Kec. Astanaan yar	Kel. Karasak
26.003	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	100.000.000	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	750.000.000	Kec. Astanaan yar	Kel. Nyengser et
26.003	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	99.999.000	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	749.999.000	Kec. Astanaan yar	Kel. Karangan yar
26.003	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	99.876.333	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	749.876.333	Kec. Astanaan yar	Kel. Panjunan



		lingkup Karang Taruna																
26.003	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	99.907.293	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	749.907.293	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak	
26.003	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	100.991.362	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	750.991.362	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan	
26.004	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	100.000.075	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	750.000.075	Kec. Astanaanyar	Kel. Karasak	
26.004	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	99.999.954	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	749.999.954	Kec. Astanaanyar	Kel. Nyengseret	
26.004	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	99.999.900	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	749.999.900	Kec. Astanaanyar	Kel. Karanganayar	
26.004	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	99.949.379	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	749.949.379	Kec. Astanaanyar	Kel. Panjunan	
26.004	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	99.952.785	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	749.952.785	Kec. Astanaanyar	Kel. Cibadak	



	26.004	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	100.030.328	4 sub kegiatan	125.000.000	4 sub kegiatan	150.000.000	4 sub kegiatan	175.000.000	4 sub kegiatan	200.000.000	20 sub kegiatan	750.030.328	Kec. Astanaanyar	Kel. Pelindung Hewan
								7.750.000.000		9.300.000.000		10.737.500.000		12.160.000.000				



Tabel 6.2

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung 2018-2023  
Setelah Perubahan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat an Unggul Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	71	3.664.862.067	75	10.179.116.000	78	11.384.939.200	78	Kec. Astanaanyar
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat an Unggul Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	71	3.556.051.567	75	10.025.000.000	78	11.200.000.000	78	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	3.480.395.313	40	6.580.000.000	40	7.520.000.000	40	Kec. Astanaanyar
		7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	3.124.716.687	58	3.445.000.000	58	3.680.000.000	58	Kec. Astanaanyar
		7.01.03.2.02.03	Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	26.316.000	1	26.316.000	-	-	-	Kec. Astanaanyar
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	108.810.500	7	154.116.000	10	184.939.200	10	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Posyandu Purnama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	26	93.290.000	32	124.260.000	36	149.112.000	36	Kec. Astanaanyar
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	15.520.500	8	29.856.000	10	35.827.200	10	Kec. Astanaanyar
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Astanaanyar	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Siskamling RW Aktif</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	51	1.322.262.000	64	1.667.932.800	77	2.001.519.360	77	Kec. Astanaanyar
		7.01.04.2.02	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Persentase Siskamling RW Aktif</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	51	1.322.262.000	64	1.667.932.800	77	2.001.519.360	77



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Jumlah pembinaan siskaming RW</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1.322.262.000	4	1.667.932.800	4	2.001.519.360	4	Kec. Astanaanyar
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>Persentase Kelurahan Unggul</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	3.682.925.591	50	4.030.643.920	75	4.827.200.900	75	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1.429.858.000	100	1.746.243.600	100	2.095.492.320	100	Kec. Astanaanyar
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	351	1.429.858.000	351	1.746.243.600	351	2.095.492.320	351	Kec. Astanaanyar
		7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	22.066.400	100	95.718.040	100	105.289.844	100	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	22.066.400	90	95.718.040	90	105.289.844	90	Kec. Astanaanyar	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	1.734.132.000	90	2.080.958.400	90	90	90	Kec. Astanaanyar	

KERAMAT  
KREATIF RESPONSIF  
AGAMIS  
AMANAH TERTIB



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1.520.110.000	4	1.734.132.000	4	2.080.958.400	4	Kec. Astanaanyar
				Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		10.000		10.000		10000	Kec. Astanaanyar

KECAMATAN  
KREATIF RESPONSIF  
AGAMIS  
AMANAH TERTIB



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	710.891.191	4	454.550.280	4	545.460.336	4	Kec. Astanaanyar
		7.01.02.2.04.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	710.891.191	4	454.550.280	4	545.460.336	4	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		100		100		100	Kec. Astanaanyar
2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	12.093.603.109	90	12.951.989.654	90	14.355.862.384	90	Kec. Astanaanyar	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	9.765.701.685	100	10.469.711.987	100	11.516.683.185	100	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	9.765.701.685	12	10.469.711.987	12	11.516.683.185	12	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.05	Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	43.312.500	1	51.975.000	1	62.370.000	1	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	43.312.500	1	51.975.000	1	62.370.000	1	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	998.717.814	100	896.269.652	100	1.070.680.091	100	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	21.863.600	4	29.189.520	4	35.027.424	4	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	213.663.114	4	331.336.152	4	397.603.382	4	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	118.271.500	4	48.434.914	4	53.278.405	4	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	451.540.700	4	240.097.800	4	288.117.360	4	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	138.434.900	4	181.278.466	4	217.534.159	4	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	23.058.000	4	27.669.600	4	33.203.520	4	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	31.886.000	100	38.263.200	100	45.915.840	100	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	772.633.250	100	963.159.900	100	1.078.168.680	100	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	155.773.250	3	186.927.900	3	224.313.480	3	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	616.860.000	20	776.232.000	20	853.855.200	20	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	513.237.860	100	570.873.116	100	627.960.428	100	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	415.024.000	38	498.028.800	38	597.634.560	38	Kec. Astanaanyar
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	26.607.000	4	35.051.640	4	42.061.968	4	Kec. Astanaanyar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	71.606.860	7	89.690.232	7	107.628.278	7	Kec. Astanaanyar	

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI  
**KERAMAT**  
**KREATIF RESPONSIF**  
**AGAMIS**  
**AMANAH TERTIB**



## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Astanaanyar untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung yaitu :

#### **Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul
2. Persentase siskamling RW Aktif
3. Persentase Kelurahan Unggul
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah Perubahan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023 Sebelum Perubahan**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspek torat	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK
2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	<b>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini :</b>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)<ul style="list-style-type: none"><li>- Ada kepengurusan</li><li>- Ada program kerja</li><li>- Mengikuti pelatihan</li><li>- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang</li><li>- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat</li></ul></li><li>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)<ul style="list-style-type: none"><li>- Ada Kepengurusan</li><li>- Gardu Sosial</li><li>- Lumbung sosial</li><li>- Peta Rawan Bencana</li><li>- Melakukan penyuluhan kepada</li></ul></li></ol>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>masyarakat kesiapsiagaan bencana</p> <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- petunjuk arah ke masjid</li> <li>- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/ alarm waktu sholat</li> </ul>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split,</li> </ul>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 9. Bank samapah tiap Kelurahan (Ekbang) 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) - Anggota Koperasi $\geq$ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</li> <li>Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</li> <li>Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</li> <li>Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas</li> <li>Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah</li> </ol>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> </ol> <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2</p>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	(% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul)/4	Kelurahan	<p><b>RW Unggul</b></p> <p><b>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</b></p> <p><b>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> <li>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</li> <li>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</li> </ol>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya  <b>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b>  1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir)



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>4. Laporan RW tepat waktu minimal form A :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)</li> <li>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</li> <li>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</li> </ul> <p>5. Koperasi di Sarana ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Anggota</li> <li>b. Memiliki Kepengurusan</li> <li>c. Memiliki AD/ART</li> </ul> <p>6. Gerakan menyemarakan tempat ibadah antara lain :</p>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah</li> <li>b. Kegiatan pengajian</li> <li>c. Mengaktifkan remaja masjid</li> <li>d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silaht urahmi</li> </ul> <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada kepengurusan</li> <li>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</li> <li>c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</li> </ul>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca) 9. 1 rumah 1 Kader Jumanti; 10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat 11. Taman Tematik ramah disabilitas 12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang; 13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air;



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							17. Kelompok Lansia Sehat; 18. Posyandu Purnama; a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat 19. RW Siaga Bencana/RW Siaga; 20. Siskamling Aktif  <b>% PKK Unggul            Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan</b>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p><b>PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>2. Melaksanakan Sosialisasi Tenologi Tepat Guna</li> <li>3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan</li> <li>4. Sosialisasi bina keluarga</li> <li>5. Sosialisasi ketertiban lingkungan</li> <li>6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>7. Koperasi PKK</li> </ol>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu  <b>% Karang Taruna Unggul Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</b>  1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana 8. Event Olah raga 9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan)  <b>% LPM Unggul            Kriteria LPM Unggul            Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung</b>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan RW siaga</li> <li>3. Melaksanakan BBGRM</li> <li>4. Pendataan profil kelurahan</li> <li>5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan</li> <li>6. Rembug warga kelurahan</li> </ol>



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							(Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI  
**KERAMAT**  
**KREATIF RESPONSIF**  
**AGAMIS**  
**AMANAH TERTIB**

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023 Setelah Perubahan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.  <b>Lingkup kegiatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> </ol>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Astanaanyar	Persentase siskamling RW Aktif	%		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	<p><b>Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</li> </ol>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpisah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minimal untuk 5 rumah</li><li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li><li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li><li>- Menggunakan pipa paralon</li><li>- Menggunakan bak kontrol</li></ul> <p>7. Kegiatan Kangpisman, memenuhi salah satu atau lebih dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bank Sampah</li><li>- Pemilahan Sampah</li><li>- Pemanfaatan Sampah</li></ul> <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li><li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li><li>- Memiliki Akte Pendirian</li></ul>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Astanaanyar Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Astanaanyar periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Astanaanyar Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Astanaanyar harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Astanaanyar Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Astanaanyar harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Astanaanyar Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Kecamatan Astanaanyar akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada



masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Astanaanyar tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada di lingkungan Kecamatan Astanaanyar.

CAMAT ASTANAANYAR

**Drs. SYUKUR SABAR**

Pembina Tk. I

NIP. 19680904 199006 1 001

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

**KERAMAT**  
**KREATIF RESPONSIF**  
**AGAMIS**  
**AMANAH TERTIB**



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SYUKUR SABAR**  
Jabatan : CAMAT ASTANAANYAR

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **H. YANA MULYANA, S.E., M.M.**  
Jabatan : Plt. WALI KOTA BANDUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama

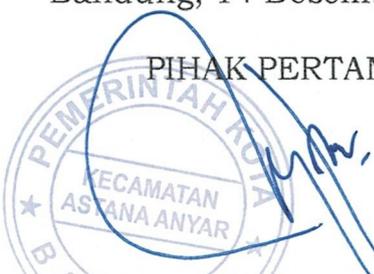
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 14 Desember 2021

PIHAK KEDUA  
  
**H. YANA MULYANA, S.E., M.M.**

PIHAK PERTAMA  
  
**Drs. SYUKUR SABAR**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19680904 199006 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ASTANAANYAR**  
**TAHUN ANGGARAN : 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	71
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Astanaanyar	Persentase Siskamling RW aktif	%	51
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar	Persentase Kelurahan Unggul	%	66
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar	Nilai	82,50

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.702.416.946	APBDP Kota Bandung Tahun 2021
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.266.205.500	APBDP Kota Bandung Tahun 2021
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.692.375.591	APBDP Kota Bandung Tahun 2021
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.259.478.309	APBDP Kota Bandung Tahun 2021
TOTAL		Rp. 20.920.476.346	

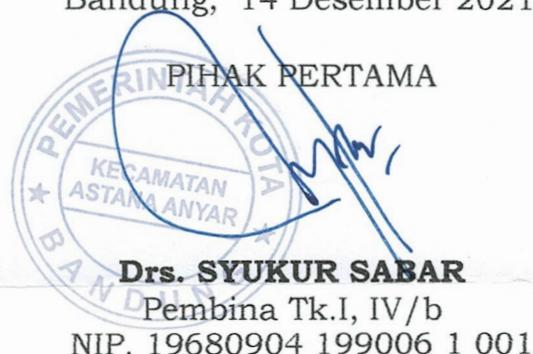
Bandung, 14 Desember 2021

PIHAK KEDUA



**H. YANA MULYANA, S.E., M.M.**

PIHAK PERTAMA



**Drs. SYUKUR SABAR**  
 Pembina Tk.I, IV/b  
 NIP. 19680904 199006 1 001